

## Prediksi perilaku korupsi dalam perspektif dimensi budaya model Hofstede

Eben Ezer Nainggolan<sup>1\*</sup>

<sup>1)</sup> Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia

\*E-mail: [ebenezer@untag-sby.ac.id](mailto:ebenezer@untag-sby.ac.id)

**Published:**  
2022-02-06

### **Abstract**

*Corruption is a global phenomenon. No country in the world is free from corruption issues, even Denmark and Newzeland which are ranked one and two cleanest countries respectively, still have index scores of 88 and 87 (not yet reached 100). This literature study aims to find answers to the question of how to predict corrupt behaviour from the perspective of the cultural dimensions of Hofstede's model. This research design is review research. Researchers searched the literature related to problem-solving skills through Google Scholar. The hermeneutic technique is used to analyze the literature that is in accordance with the research objectives. The results showed that the Power Distance Dimension and the Individualism-Collectivism Dimension had a strong indication of having a relationship with the Corruption Perception Index.*

**Keywords:** *Corruption Behavior, Cultural Perspective, Hofstede's Model*

### **Abstrak**

*Korupsi merupakan fenomena global. Tidak satupun negara di dunia yang bebas dari persoalan korupsi, bahkan Denmark dan Newzeland yang berturut turut menempati peringkat satu dan dua negara terbersih masih memiliki skor indeks 88 dan 87 (belum mencapai angka 100). Penelitian ini literatur ini bertujuan untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan bagaimana prediksi perilaku korupsi dalam perspektif dimensi budaya model Hofstede. Desain penelitian ini adalah penelitian review. Peneliti melakukan penelusuran literatur-literatur yang terkait dengan kemampuan problem solving melalui google scholar. Teknik hermeunetika digunakan untuk menganalisis literatur-literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan Dimensi Power Distance dan Dimensi Individualisme-Kolektivisme memiliki indikasi kuat memiliki hubungan dengan Indeks Persepsi Korupsi.*

**Kata Kunci:** *Perilaku Korupsi, Perspektif Budaya, Model Hofstede*

**Copyright © 2022. Eben Ezer Nainggolan**

---

## Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena global. Tidak satupun negara di dunia yang bebas dari persoalan korupsi. Perbedaan persoalan korupsi di berbagai negara hanyalah mengenai besar-kecil atau parah-tidaknya korupsi yang dihadapi negara bersangkutan; sedangkan kompleksitasnya sama. *The 2018 Corruption Perception Index*, yang dipublikasikan oleh *Transparency International* mengkonfirmasi hal tersebut (<https://knoema.com/atlas/maps/Corruption-perceptions-index>). Dengan menggunakan skala penilaian dari 0 (*highly corruption*) hingga 100 (*very clean*), tidak satupun negara yang meraih skor 100. Denmark dan Newzeland yang berturut-turut menempati peringkat satu dan dua negara terbersih dalam persoalan korupsi berturut-turut memiliki skor indeks persepsi korupsi 88 dan 87. Dilaporkan bahwa berdasarkan skor indeks persepsi korupsi ini lebih dari dua per tiga negara yang disurvei memiliki skor kurang dari 50; sedangkan skor rata-rata indeks persepsi korupsi di seluruh negara yang disurvei adalah 43. Bagian laporan yang menyedihkan adalah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir hanya sebagian kecil yang mengalami kemajuan berarti (20 negara), sebagian besar negara tidak mengalami kemajuan yang berarti, bahkan sejumlah negara (16 negara) justru mengalami kemunduran.

Lambsdorff (2006) mengemukakan beberapa konsekuensi yang timbul dari perilaku korupsi adalah ketidakadilan pendapatan (*inequality of income*), pendapatan per kapita rendah, tingkat investasi rendah, penyimpangan alokasi anggaran, kualitas sektor publik rendah, distorsi pasar, maraknya pasar gelap, dan penggelapan pajak. Selanjutnya Blackburn & Forgues-Puccio (2009) menyebutkan bahwa dari perspektif bisnis, korupsi telah merusak atau menghancurkan *incentives* dan *opportunities*, menghambat inovasi dan alih teknologi yang selanjutnya menciptakan lingkungan bisnis yang buruk. Staphenurst, dkk. (2006), secara lebih meyakinkan, menyatakan bahwa korupsi tidak saja berkontribusi terhadap pelemahan ekonomi, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, para pemimpin yang illegitimate, dan kejahatan yang terorganisir, tapi juga berkontribusi pada meningkatnya polarisasi sosial; dan dalam kasus yang ekstrim, dapat memicu pergolakan politik. Menurut *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), di seluruh dunia telah terjadi penggelapan pajak sebesar USD 2,1 triliun di tahun 2009, satu besaran yang setara dengan GDP Inggris (UNODC, 2011). Sungguh tidak berlebihan jika Gire (dalam Dimant, E., 2013) menyebutkan bahwa korupsi adalah salah satu penyakit sosial yang paling berbahaya bagi masyarakat manapun. Korupsi seperti satu penyakit virus yang mematikan, yang menyerang bagian/struktur yang paling penting (*vital*) dari satu masyarakat yang diadakan bagi perkembangan masyarakat tersebut.

Tentu ada begitu banyak pertanyaan yang dapat diajukan sehubungan dengan perilaku korupsi. Keseluruhan pertanyaan dapat dirangkum ke dalam pertanyaan “apa, mengapa dan bagaimana” korupsi. Sebagaimana pengertian korupsi yang sulit dirumuskan ke dalam satu pengertian yang dapat diterima semua pihak, maka demikian juga jawaban terhadap pertanyaan menyangkut ‘apa, mengapa, dan bagaimana korupsi’ tersebut. Makalah ini dimaksudkan untuk ikut urun-rembug dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut dengan batasan pertanyaan: ***apakah kecenderungan perilaku korupsi seseorang dapat diprediksi berdasarkan dimensi-dimensi budaya model Hofstede?*** Untuk menjawab pertanyaan tersebut berturut-turut akan dibahas: budaya; korupsi dan budaya; dimensi-dimensi budaya model Hofstede; prediksi korupsi berdasarkan dimensi-dimensi budaya model Hofstede.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian literatur, peneliti memperoleh data melalui studi kepustakaan. Secara teknis peneliti melakukan penelusuran literatur dari berbagai sumber, seperti buku dan artikel ilmiah. Literatur yang sesuai dengan topik penelitian kemudian dianalisis menggunakan hermeneutika. Hermeneutika digunakan untuk menginterpretasi berbagai sumber pustaka yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang tepat terhadap literatur yang ada. Penggunaan hermeneutika sebagai rancangan penelitian membuat penafsiran terhadap literatur lebih kritis dan reflektif. Interpretasi menjadi lebih relevan dengan fenomena dan proses reduksinya menjadi lebih lengkap (Larkin, dkk., 2011).

## Hasil dan Pembahasan

### *Budaya*

Ada begitu banyak definisi budaya sehingga mendefinisikan budaya adalah suatu tantangan tersendiri. Dalam pengertian yang paling sempit budaya dimengerti sebagai sebuah alat atau sarana (*device*) koordinasi, yaitu seperangkat norma-norma sosial dan keyakinan yang membawa sebuah masyarakat ke satu keseimbangan (*equilibrium*) spesifik ketika terdapat *equilibrium ganda* (Greif, 1994). Untuk definisi yang lebih luas, budaya dipahami sebagai “nilai-nilai, sikap, keyakinan, orientasi dan asumsi-asumsi yang mendasari, yang lazim ‘hidup’ di antara individu dalam satu masyarakat” (Huntington, 2000). Secara implisit pengertian ini menempatkan budaya yang di dalamnya terdapat institusi formal dan informal. Pada tingkat yang paling rendah, budaya selalu memiliki *informal rules of behavior*. Misalnya, mengatakan bahwa satu masyarakat memiliki budaya *patriarchal*, sama halnya dengan mengatakan bahwa setidaknya aturan informalnya menempatkan laki-laki sebagai figur otorita yang utama. Aturan formalnya dapat memaksa laki-laki sebagai figur otorita (seperti hukum yang melarang perempuan bekerja, seperti di Arab Saudi. Pada beberapa kasus, aturan formal boleh jadi berlawanan (misalnya, aturan kuota perwakilan perempuan di DPR di India). Sejauh mana norma dan/atau institusi mengatur perilaku adalah aspek lain dari budaya.

Di banyak definisi budaya, kata “shared” hampir selalu ditemukan, karenanya kelompok dapat didefinisikan oleh “*shared values*” ini. Huntington (2000), Greif (2004), Frenanez (2008), Barr and Serra (2010) misalnya, mendefinisikan budaya sebagai “*share values and beliefs governing interaction among individuals*. Namun Korb (2009) secara lugas menjelaskan budaya sebagai berikut:

**“Culture is share way of life of group of people. Culture is shared patterns of behaviors and interactions, cognitive constructs, and affective understanding learned through the process of socialization. Culture is not Artifacts, tools, or other tangible cultural elements; culture is how members of the cultural group interpret, use, and perceive the objects. Culture consists of values, beliefs, attitudes, interpretations, and perspectives that distinguish one group of people from another. Culture is manifested by symbols (communication or object that carries a particular meaning within a group); heroes (people who possess characteristics highly prized in a culture); ritual (social activities that are socially essential); and values (preferences of a specific state of affairs to others; e.g., good-bad)”.**

**Budaya adalah** cara hidup bersama dari sekelompok orang. **Budaya adalah** pola perilaku dan interaksi bersama, konstruksi kognitif bersama, dan pemahaman afektif bersama yang dipelajari melalui proses sosialisasi. **Budaya bukan** artifak, alat, atau elemen-elemen

---

*tangible* lain; budaya adalah cara anggota satu kelompok (budaya) menginterpretasi, menggunakan, dan mempersepsi objek-objek. **Budaya berisi** nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, sikap-sikap, interpretasi, dan cara pandang (perspektif) yang membedakan satu kelompok dari kelompok yang lain. **Budaya dimanifestasikan melalui** simbol-simbol (komunikasi atau objek yang membawa satu makna tertentu di dalam satu kelompok); *hero* (orang-orang yang memiliki karakteristik yang sangat dihargai di satu budaya); ritual (aktivitas sosial yang secara sosial sangat penting, sangat esensial); dan nilai (preferensi mengenai satu keadaan khusus dari persoalan bagi orang lain; misalnya, baik – buruk). Melalui penjelasan Korb tersebut menjadi jelas apa yang merupakan budaya dan yang bukan merupakan budaya, isi, dan manifestasinya.

### **Korupsi dan Budaya**

Definisi korupsi yang paling sederhana adalah sebagaimana yang digunakan oleh *World Bank*, yaitu *the abuse of public power for private benefit* (Tanzi, 1998). Senada dengan definisi ini, Ekiyor (dalam David, 2012) mengemukakan bahwa secara umum korupsi dapat didefinisikan sebagai *unlawful use of official power or influence by an official of the government either to enrich himself or further his course and/or any other person at the expense of the public, incotravention of his oath of office and/ or contrary to the conventions or laws that are in force*. Meski belum dapat mengakomodir pengertian korupsi secara tuntas, setidaknya melalui definisi ini beberapa atribut korupsi dapat dipahami, seperti: korupsi adalah perilaku, tindakan atau perbuatan yang *unlawful*, memperkaya diri (*private benefit, enrich himself*) dan merugikan negara (*at the expense of the public*), dan karenanya juga merugikan masyarakat. Gire (dalam Dimant, E.,2013) menyebutkan bahwa korupsi adalah salah satu penyakit sosial yang paling berbahaya bagi masyarakat manapun. Korupsi seperti satu penyakit virus yang mematikan, yang menyerang bagian/ struktur yang paling penting (*vital*) dari satu masyarakat yang diadakan bagi perkembangan masyarakat tersebut.

Apakah budaya dan korupsi berkorelasi? Perilaku korupsi tidak lagi dapat dilihat dari perspektif untung-rugi secara ekonomi. Faktor *intrinsic motivation* sangatlah berperan terhadap munculnya perilaku korupsi pada seseorang. Pertanyaannya adalah apakah faktor-faktor *intrinsic motivation* tersebut ada hubungannya dengan budaya?

Jawaban sederhana atas pertanyaan tersebut, merujuk pada Judge, dkk. (2011), misalnya, yang berdasarkan *overview* atas 42 studi yang berlangsung pada rentang waktu 11 tahun mulai Tahun 1995 hingga Tahun 2006 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak korupsi, mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut menjadi faktor ekonomi seperti kemiskinan, inflasi, globalisasi, pajak; faktor politik atau hukum seperti sistem hukum, persaingan politik, *delegation of power* dan demokrasi; dan faktor sosial-budaya, seperti pendidikan, sumber daya alam, jumlah penduduk dan agama; adalah “ya”. Mengenai dinamikanya, Barr dan Serra (2010) menjelaskan bahwa motivasi-motivasi intrinsik pada dasarnya muncul dari internalisasi norma-norma sosial yang hidup di tengah-tengah satu masyarakat. Dikatakan sebagai norma sosial ketika nilai-nilai yang mendasari norma tersebut merupakan norma bersama, sedemikian rupa sehingga penyimpangan dari norma tersebut akan memicu penolakan sosial (*social disapproval*), dan jika norma tersebut mengalami internalisasi ke dalam diri seseorang, penyimpangan terhadap norma tersebut akan menimbulkan rasa malu dan rasa bersalah (Young, 2008). Dengan demikian nilai-nilai kultural atau budaya akan “menjastifikasi” dan mengarahkan (*guide*) cara institusi sosial berfungsi, tujuan, dan mode kerja institusi sosial. Seseorang akan menggunakannya untuk memilih satu tindakan, mengevaluasi tindakan orang lain dan peristiwa, dan menjelaskan atau menjastifikasi dan mengevaluasi tindakan mereka (Licht dkk., 2007).

Banyak pihak berpendapat bahwa nilai dan keyakinan, tanpa perubahan, diantarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya utamanya melalui sosialisasi, dan karenanya dapat dikatakan bahwa salah satu ciri budaya adalah lamban dalam perubahan (Guiso, dkk., 2006). Namun, interaksi sosial sangat mungkin merubah nilai-nilai budaya dan norma sosial setidaknya partly endogenous (Akerlof, 1980). Tidak hanya nilai yang keyakinan yang mempengaruhi ketaatan terhadap norma sosial, tetapi proporsi masyarakat yang mentaati norma juga mempengaruhi keyakinan individu terhadap nilai yang mendasari nilai tersebut, dan sebagai konsekuensinya, juga kemungkinan bahwa norma tersebut akan mengalami internalisasi ke dalam diri seseorang dan generasi berikutnya. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa budaya mempunyai pengaruh terhadap perilaku korupsi.

Banuri dan Eckel (2012) mengemukakan bahwa Budaya mempengaruhi institusi dan norma sosial, menentukan (dictate) interaksi agen-agen di dalam satu masyarakat, bahkan akan mempengaruhi korupsi yang bagaimana yang akan terjadi (dominan) di dalam satu masyarakat tertentu.

Budaya berinteraksi dengan korupsi melalui insitusi formal dan norma-norma sosial; dua hal yang dapat sangat berbeda antara satu negara dengan negara lain. Bagi satu pemerintahan yang berusaha mencegah (menghambat) korupsi, tujuannya adalah *to devise* institusi formal yang dapat mendukung norma sosial yang ada. Aturan formal dan informal bisa jadi tidak saling mendukung satu sama lain. Sebagai ilustrasi hal ini, Wade (1982) menemukan bahwa Indian Villagers (Masyarakat Indian) mendefinisikan perbuatan korupsi sebagai satu perbuatan dimana pejabat meminta uang suap (bribes) dengan besaran yang melebihi besaran yang lazim atau biasanya; yang bertentangan dengan aturan formal yang melarang sogok dengan besaran berapapun. Di Amerika, misalnya, permintaan akan uang suap, berapapun besarnya, akan dianggap sebagai korupsi.

Para peneliti telah mengidentifikasi empat mekanisme yang mendukung kontrak informal: trust, reputation, hostage-taking, dan reciprocity (Rose Ackerman, 1999; Cramton dan Dees, 1993). Norma-norma sosial ini memfasilitasi tidak saja transaksi-transaksi yang resmi, tetapi juga transaksi yang korup; dan hal ini berbeda antara budaya satu dengan yang lain. Untuk menggambarkan hubungan antara trust dan korupsi, dengan asumsi hal-hal lainnya sama, masyarakat dengan tingkat interpersonal trust yang tinggi akan menunjukkan tingkat korupsi yang lebih tinggi pula (Rose-Ackerman, 1999). Hal ini dikarenakan trust relationship akan mengurangi resiko terungkapnya satu transaksi yang korup. Individu dari masyarakat yang percaya terbiasa (reliance) pada kontrak-kontrak informal (entah itu korupsi atau bukan) akan lebih mungkin untuk mengandalkan (rely on) dan terlibat pada kontrak-kontrak informal di waktu yang akan datang. Hal ini akan menjelaskan satu transmisi kultural mengenai korupsi (Barr dan Serra, 2010): individu dari masyarakat dimana transaksi korupsi adalah biasa, akan lebih besar peluangnya terlibat korupsi, dan akan mengharapkan orang lain melakukan (terlibat) korupsi. Dengan demikian, norma korupsi adalah satu bentuk spesifik dari norma sosial, dan yang menyatakan sejauh mana individu terlibat, dan mengharapkan orang lain terlibat dalam korupsi, yang lepas dari institusinya.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa selain sejarah institusi mempengaruhi kinerja ekonomi, sejarah institusi juga mempengaruhi tingkat korupsi di satu masyarakat. Sebagai contoh, Andvig dan Moene (1990) dan Tirole (1996) menggunakan *game-theoretic framework* untuk menunjukkan bahwa korupsi dapat merupakan outcome dari satu masalah koordinasi dalam kondisi yang multiple equilibria, dan karenanya sejarah menentukan efektivitas satu intervensi. Studi kasus di Bolivia dan Venezuela menunjukkan bahwa sejarah institusi sangat mempengaruhi munculnya korupsi (Dininio, 2005). Hauk dan Saez-Marti (2002) menggunakan "overlapping-generations model" untuk menunjukkan bagaimana nilai-

nilai mengalami proses 'transferred' dari generasi ke generasi. Mereka mengatakan bahwa upaya mengubah norma akan lebih berhasil dibandingkan sanksi: kebijakan yang fokus pada pendidikan anak mengenai bahaya korupsi akan jauh lebih efektif dibandingkan belanja/ biaya untuk mengawasi dan memberi hukuman bagi para koruptor.

### Dimensi Budaya Model Hofstede

Hofstede (2011) mengemukakan enam dimensi budaya, yaitu: a) *power distance*; b) *uncertainty avoidance*; c) *individualism-collectivism*; d) *masculinity-femininity*; e) *long term-short term orientation*; f) dan *indulgence-restraint*.

**a) Power Distance.** *Power distance*, adalah tingkat sejauh mana anggota satu institusi dan masyarakat dalam satu negara memandang dan menerima kekuasaan (power) yang terdistribusi secara tidak sama. Power dan ketidaksetaraan, tentu saja, merupakan fakta mendasar yang ekstrim dari sebuah masyarakat. Semua masyarakat tidaklah equal, tetapi pada beberapa masyarakat lebih tidak equal dibanding masyarakat lainnya. Sebagai catatan, pandangan ketidaksetaraan ini, dilihat dari pihak yang memiliki power yang lebih sedikit atau kecil; bukan dari pihak yang memiliki power yang lebih besar, kedudukan lebih tinggi. Secara singkat *power distance* adalah gambaran ekspresi sikap budaya terhadap ketidaksetaraan (inequality) yang ada di dalam masyarakat.

Berdasarkan dimensi *power distance*, masyarakat dapat dibedakan menjadi masyarakat dengan budaya *power distance* kecil dan masyarakat dengan budaya *power distance* besar. Perbedaan kedua budaya tersebut, yang menonjol adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Small Power Distance	Large Power Distance
1) Use of power should be legitimate and is subject to criteria of good and evil	1) Power is a basic fact of society antedating good or evil: its legitimacy is irrelevant
2) Parents treat children as equals	2) Parents teach children obedience
3) Older people are neither respected nor feared	3) Older people are both respected and feared
4) Student-centered education	4) Teacher-centered education
5) Hierarchy means inequality of roles, established for convenience	5) Hierarchy means existential inequality
6) Subordinates expect to be consulted	6) Subordinates expect to be told what to do
7) Pluralist governments based on majority vote and changed peacefully	7) Autocratic governments based on co-optation and changed by revolution
8) Corruption rare; scandals end political careers	8) Corruption frequent; scandals are covered up
9) Income distribution in society rather even	9) Income distribution in society very uneven
10) Religions stressing equality of believers	11) Religions with a hierarchy of priests

*b) Individualism-Collectivism.* Individualisme dan kolektivisme yang dimaksud dalam dimensi ini bukanlah sebuah karakteristik individu. Ia merupakan tingkat sejauh mana orang-orang di dalam satu masyarakat terintegrasi ke dalam kelompok. Isu yang mendasar dari dimensi ini adalah sejauh mana tingkat kesalingtergantungan satu masyarakat ada di dalam anggota masyarakatnya. Di dalam masyarakat dengan budaya individualis, anggota masyarakatnya akan hanya memperhatikan diri dan keluarga inti saja. Sedangkan pada masyarakat dengan budaya kolektifis akan juga memperhatikan tidak saja diri dan keluarga inti, tetapi juga keluarga besar (*extended families*), seperti kakek-nenek, paman-bibi, dst. Beberapa perbedaan yang menonjol dari masyarakat dengan budaya individualis dan masyarakat dengan budaya kolektifis adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini

Individualism	Collectivism
1) Everyone is supposed to take care of him- or herself and his or her immediate family only	1) People are born into extended families or clans which protect them in exchange for loyalty
2) "I" – consciousness	2) "We" –consciousness
3) Right of privacy	3) Stress on belonging
4) Speaking one's mind is healthy	4) Harmony should always be maintained
5) Others classified as individuals	5) Others classified as in-group or out-group
6) Personal opinion expected: one person one vote	6) Opinions and votes predetermined by in-group
7) Transgression of norms leads to guilt feelings	7) Transgression of norms leads to shame feelings
8) Languages in which the word "I" is indispensable	8) Languages in which the word "I" is avoided
9) Purpose of education is learning how to learn	9) Purpose of education is learning how to do
10) Task prevails over relationship	10) Relationship prevails over task

*c) Masculinity-Femininity.* Maskulinitas dan Femininitas yang dimaksud di dalam dimensi ini bukanlah satu karakteristik individu, tetapi satu budaya yang merujuk pada distribusi nilai yang terjadi diantara gender. Persoalan pokok dimensi ini adalah apa yang memotivasi seseorang dalam bertindak, ingin menjadi yang terbaik (maskulin) atau menyukai hal yang dilakukannya (feminin). Di dalam masyarakat dengan budaya maskulin, perbuatan masyarakat lebih banyak didorong oleh kompetisi, prestasi dan sukses; sedangkan di dalam masyarakat dengan budaya feminin, perbuatan masyarakat lebih banyak didorong oleh nilai peduli sesama dan kualitas hidup. Beberapa perbedaan yang menonjol dari masyarakat dengan budaya maskulin dan masyarakat dengan budaya feminin adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Femininity	Masculinity
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimum emotional and social role differentiation between the genders</li> <li>2. Men and women should be modest and caring</li> <li>3. Balance between family and work</li> <li>4. Sympathy for the weak</li> <li>5. Both fathers and mothers deal with facts and Feelings</li> <li>6. Both boys and girls may cry but neither should fight</li> <li>7. Mothers decide on number of children</li> <li>8. Many women in elected political positions</li> <li>9. Religion focuses on fellow human beings</li> <li>10. Matter-of-fact attitudes about sexuality; sex is a way of relating</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maximum emotional and social role differentiation between the genders</li> <li>2. Men should be and women may be assertive and ambitious</li> <li>3. Work prevails over family</li> <li>4. Admiration for the strong</li> <li>5. Fathers deal with facts, mothers with feelings</li> <li>6. Girls cry, boys don't; boys should fight back, girls shouldn't fight</li> <li>7. Fathers decide on family size</li> <li>8. Few women in elected political positions</li> <li>9. Religion focuses on God or gods</li> <li>10. Moralistic attitudes about sexuality; sex is a way of performing</li> </ol>

d. *Uncertainty Avoidance*. Dimensi *uncertainty avoidance* adalah sejauh mana anggota satu masyarakat budaya merasa terancam (*threatened*) oleh satu situasi yang ambigu atau tidak jelas dan menciptakan keyakinan dan institusi-institusi yang berusaha melepaskan atau menghindari situasi tersebut. *Uncertainty Avoidance* tidak sama dengan penghidaran resiko; tetapi lebih pada toleransi masyarakat terhadap satu situasi yang ambigu atau tidak jelas, tidak pasti, yang tidak terstruktur seperti situasi baru, belum dikenal, yang berbeda dari biasanya. Budaya yang *uncertainty avoidance* akan berusaha meminimalkan kemungkinan terjadinya situasi seperti itu dengan cara menciptakan hukum dan peraturan, kode etik, penolakan terhadap pendapat yang menyimpan, dan kepercayaan terhadap Kebenaran Absolute. Dimensi *uncertainty avoidance* adalah cara satu masyarakat menangani atau menghadapi fakta-fakta waktu yang akan datang yang belum diketahui. Berdasarkan dimensi ini, masyarakat dapat dibedakan atas masyarakat dengan budaya *uncertainty avoidance lemah* dan masyarakat dengan budaya *uncertainty avoidance kuat*. Beberapa perbedaan menonjol dari kedua budaya tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Weak Uncertainty Avoidance	Strong Uncertainty Avoidance
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The uncertainty inherent in life is accepted and each day is taken as it comes</li> <li>2. Ease, lower stress, self-control, low anxiety</li> <li>3. Higher scores on subjective health and wellbeing</li> <li>4. Tolerance of deviant persons and ideas: what is different is curious</li> <li>5. Comfortable with ambiguity and chaos</li> <li>6. Teachers may say 'I don't know'</li> <li>7. Changing jobs no problem</li> <li>8. Dislike of rules - written or unwritten</li> <li>9. In politics, citizens feel and are seen as competent towards authorities</li> <li>10. In religion, philosophy and science: relativism and empiricism</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The uncertainty inherent in life is felt as a continuous threat that must be fought</li> <li>2. Higher stress, emotionality, anxiety, neuroticism</li> <li>3. Lower scores on subjective health and well-being</li> <li>4. Intolerance of deviant persons and ideas: what is different is dangerous</li> <li>5. Need for clarity and structure</li> <li>6. Teachers supposed to have all the answers</li> <li>7. Staying in jobs even if disliked</li> <li>8. Emotional need for rules – even if not obeyed</li> <li>9. In politics, citizens feel and are seen as incompetent towards authorities</li> <li>10. In religion, philosophy and science: belief in ultimate truths and grand theories</li> </ol>

e) Long Term Orientation-Short Term Orientation. Dimensi long-term – short-term orientation menjelaskan cara setiap masyarakat merawat hal-hal yang berkenaan dengan peristiwa masa lalu sembari menghadapi tantangan yang ada pada saat ini dan di waktu yang akan datang. Masyarakat dengan budaya short-term orientation lebih menyukai merawat norma-norma dan *time-honoured traditions* dan melihat perubahan sosial dengan curiga. Sedangkan masyarakat dengan budaya long-term orientation menggunakan pendekatan yang lebih pragmatik; mendukung dan mendorong upaya perbaikan dalam pendidikan moderen sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Beberapa perbedaan masyarakat dengan budaya ini adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

<b>Short-Term Orientation</b>	<b>Long-Term Orientation</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Most important events in life occurred in the past or take place now</li> <li>2. Personal steadiness and stability: a good person is always the same</li> <li>3. There are universal guidelines about what is good and evil</li> <li>4. Traditions are sacrosanct</li> <li>5. Family life guided by imperatives</li> <li>6. Supposed to be proud of one's country</li> <li>7. Service to others is an important goal</li> <li>8. Social spending and consumption</li> <li>9. Students attribute success and failure to luck</li> <li>10. Slow or no economic growth of poor countries</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Most important events in life will occur in the future</li> <li>2. A good person adapts to the circumstances</li> <li>3. What is good and evil depends upon the circumstances</li> <li>4. Traditions are adaptable to changed circumstances</li> <li>5. Family life guided by shared tasks</li> <li>6. Trying to learn from other countries</li> <li>7. Thrift and perseverance are important goals</li> <li>8. Large savings quote, funds available for investment</li> <li>9. Students attribute success to effort and failure to lack of effort</li> <li>10. Fast economic growth of countries up till a level of prosperity</li> </ol>

f) Indulgence. Dimensi ini berhubungan dengan masalah pola asuh anak oleh masyarakat, dan didefinisikan sebagai sejauh mana masyarakat berusaha mengendalikan (kontrol atas) keinginan-keinginan (desires) dan dorongan-dorongan (impulse), berdasarkan cara pengasuhan anak. Masyarakat dikatakan memiliki budaya indulgence ketika kontrol atas keinginan dan dorongan tersebut relatif lemah; dan disebut masyarakat dengan budaya restrained, ketika kontrol atas keinginan dan dorongan tersebut relatif kuat. Beberapa perbedaan menonjol masyarakat dengan budaya indulgent-restraint tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

<b>Indulgence</b>	<b>Restrained</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Higher percentage of people declaring themselves very happy</li> <li>2. A perception of personal life control</li> <li>3. Freedom of speech seen as important</li> <li>4. Higher importance of leisure</li> <li>5. More likely to remember positive emotions</li> <li>6. In countries with educated populations, higher birthrates</li> <li>7. More people actively involved in sports</li> <li>8. In countries with enough food, higher percentages of obese people</li> <li>9. In wealthy countries, lenient sexual norms</li> <li>10. Maintaining order in the nation is not given a high priority</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fewer very happy people</li> <li>2. A perception of helplessness: what happens to me is not my own doing</li> <li>3. Freedom of speech is not a primary concern</li> <li>4. Lower importance of leisure</li> <li>5. Less likely to remember positive emotions</li> <li>6. In countries with educated populations, lower birthrates</li> <li>7. Fewer people actively involved in sports</li> <li>8. In countries with enough food, fewer obese people</li> <li>9. In wealthy countries, stricter sexual norms</li> <li>10. Higher number of police officers per 100,000 population</li> </ol>

## Prediksi Korupsi Berdasarkan Dimensi Budaya Model Hofstede

Ada banyak cara untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan terkait dengan prediksi korupsi berdasarkan dimensi budaya Model Hofstede. Diantaranya adalah dengan cara melakukan *critical analysis* terhadap masing-masing dimensi budaya Model Hofstede; dan yang lain adalah dengan cara melakukan *empirical analysis* terhadap data mengenai korupsi dan budaya. Pada makalah ini cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah dengan mencermati data empiris mengenai korupsi dan dimensi budaya model Hofstede. Data empiris korupsi yang dimaksud adalah laporan Transparency International tentang Perception Corruption Index Tahun 2018; dan data empiris dimensi budaya yang dimaksud adalah laporan penelitian Hofstede sebagaimana disajikan di dalam artikelnya: *Dimensionalizing Culture, The Hofstede Model in Context*.

### a) Korupsi dan Dimensi Power Distance

Berdasarkan dimensi power distance, Hofstede membedakan masyarakat menjadi masyarakat dengan budaya *small power distance* dan masyarakat dengan budaya *large power distance*. Berdasarkan skor Indeks *Power Distance* 76 negara yang diteliti, Hofstede, dkk. (2010) menemukan bahwa negara dengan Indeks Power Distance tinggi adalah negara-negara Eropa Timur, Latin, Asia dan Afrika; sedangkan negara dengan Indeks Power Distance rendah adalah negara-negara Barat yang berbahasa Jerman dan Inggris. Di sisi lain, berdasarkan laporan Transparency International (2019) mengenai Indeks Persepsi Korupsi, dalam skala 100 (1 untuk penilaian terburuk, dan 100 untuk penilaian terbaik), dilaporkan bahwa rerata IPK negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah adalah 35, rerata IPK negara-negara Afrika adalah 32; sedangkan rerata IPK negara-negara Eropa Barat adalah 66. Secara singkat kondisi ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Dimensi:	Small Power Distance	Large Power Distance
Power Distance	Germanic and English-speaking Western Countries	East European, Latin, Asian and African countries
Indeks Persepsi Korupsi	66	32

Berdasarkan data tersebut, secara matematis sederhana dapat diketahui bahwa ada perbedaan indeks persepsi korupsi antara negara-negara dengan budaya *small power distance* dan negara-negara dengan budaya *big power distance*. Negara dengan budaya *Small Power Distance* cenderung dipersepsi sebagai negara yang tingkat korupsinya rendah dibandingkan dengan negara dengan budaya *Large Power distance*.

### b) Korupsi dan Dimensi Uncertainty Avoidance

Berdasarkan Dimensi **Uncertainty Avoidance**, Hofstede membedakan masyarakat menjadi masyarakat dengan budaya *Uncertainty Avoidance* lemah dan masyarakat dengan budaya *Uncertainty Avoidance* kuat. Berdasarkan skor Indeks *Uncertainty Avoidance* 76 negara yang diteliti, Hofstede, dkk. (2010) menemukan bahwa negara dengan budaya *Uncertainty Avoidance* lemah adalah negara-negara berbahasa Inggris, Nordic dan Cina; sementara negara dengan budaya *Uncertainty Avoidance* kuat adalah negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah, Latin, Jepang dan Jerman. Di sisi lain, berdasarkan laporan Transparency International (2019) mengenai Indeks Persepsi Korupsi, dalam skala 100 (1 untuk penilaian terburuk, dan 100 untuk penilaian terbaik), dilaporkan bahwa rerata IPK negara-negara Inggris, Nordic dan Cina adalah 66; sedangkan rerata IPK negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah, Latin, Jepang dan Jerman adalah 35. Secara singkat kondisi ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

<b>Dimensi:</b>	<b>Weak Uncertainty Avoidance</b>	<b>Strong Uncertainty Avoidance</b>
Uncertainty Avoidance	English speaking, Nordic and chinese culture contries	East and Central European countries, Latin, Japan, German
Indeks Persepsi Korupsi	80 – 39	35, 80, 73

Berdasarkan data tersebut, secara matematis sederhana dapat diketahui bahwa tidakn terdapat perbedaan indeks persepsi korupsi antara negara-negara dengan budaya Uncertainty Avoidance lemah dan negara dengan budaya Uncertainty Avoidance kuat. Pada kedua budaya terdapat peluang yang sama untuk dipersepsi sebagai negara dengan korupsi yang tinggi maupun sebagai negara dengan korupsi rendah.

### **c) Korupsi dan Dimensi Individualisme-Collectivisme**

Berdasarkan Dimensi Individualisme-Collectivisme, Hofstede membedakan masyarakat dengan budaya individualisme dan masyarakat dengan budaya kolektivisme. Berdasarkan skor Indeks Power Distance 76 negara yang diteliti, Hofstede, dkk. (2010) menemukan bahwa negara dengan budaya kolektivisme adalah negara-negara Timur, sementara negara dengan budaya kolektivisme adalah negara-negara Barat. Di sisi lain, berdasarkan laporan Transparancy International (2019) mengenai Indeks Persepsi Korupsi, dalam skala 100 (1 untuk penilaian terburuk, dan 100 untuk penilaian terbaik), dilaporkan bahwa rerata IPK negara-negara Barat adalah 66; sedangkan rerata IPK negara-negara Timur adalah 35. Secara singkat kondisi ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

<b>Dimensi:</b>	<b>Individualism</b>	<b>Collectivism</b>
Individualisme-Collectivism	Developed and Western Countries	Less Developed and Eastern Countries
Indeks Persepsi Korupsi	66	35

Berdasarkan data tersebut, secara matematis sederhana dapat diketahui bahwa ada perbedaan indeks persepsi korupsi antara negara-negara dengan budaya individualisme dan negara dengan budaya kolektivisme. Negara dengan budaya kolektivisme cenderung memiliki indeks persepsi korupsi lebih rendah, artinya korupsi di negara tersebut dipersepsi lebih buruk dibandingkan negara dengan budaya individualisme.

### **d) Korupsi – dimensi Maskuliniti – Femininiti**

Berdasarkan Dimensi Maskuliniti – Femininiti, Hofstede membedakan masyarakat dengan budaya Maskulin dan masyarakat dengan budaya Feminin. Berdasarkan skor Indeks Maskulinity-Femininity 76 negara yang diteliti, Hofstede, dkk. (2010) menemukan bahwa negara dengan budaya Maskulin adalah Jepang, Jerman, Itali dan Meksiko; sementara negara dengan budaya Feminin adalah negara-negara Nordic dan Netherland (Belanda). Di sisi lain, berdasarkan laporan Transparancy International (2019) mengenai Indeks Persepsi Korupsi, dalam skala 100 (1 untuk penilaian terburuk, dan 100 untuk penilaian terbaik), dilaporkan bahwa rerata IPK negara-negara dengan budaya maskulin seperti Jepang, Jerman, Itali dan Meksiko berturut-turut adalah 79,80,52, 28; sedangkan rerata IPK negara-negara dengan budaya Feminin seperti Belanda adalah 82. Secara singkat kondisi ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Dimensi	Feminin	Maskulin
Masculinity-Femininity	Nordic Countries, Netherlands	Japan, German, Italy and Mexico
Indeks Persepsi Korupsi	82, 50	79, 80, 52, 28

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa antara negara dengan Budaya Feminin dan negara dengan Budaya Maskulin tidak terdapat arah yang jelas. Tidak dapat disimpulkan bahwa negara dengan budaya Feminin memiliki kecenderungan korupsi yang lebih tinggi daripada negara dengan budaya maskulin.

**e) Korupsi – Dimensi Long/Short Term Orientation**

Berdasarkan Dimensi Long/Short Term Orientation, Hofstede membedakan masyarakat dengan budaya Long-Term Orientation dan masyarakat dengan budaya Short-Term Orientation. Berdasarkan skor Indeks Masculinity-Femininity 76 negara yang diteliti, Hofstede, dkk. (2010) menemukan bahwa negara dengan budaya Long-Term Orientation adalah negara-negara Asia Timur, Eropa Timur, dan Eropa Tengah; sementara negara dengan budaya Short-Term Orientation adalah Amerika, Australia, Amerika Latin, Afrika dan negara-negara Islam. Di sisi lain, berdasarkan laporan Transparancy International (2019) mengenai Indeks Persepsi Korupsi, dalam skala 100 (1 untuk penilaian terburuk, dan 100 untuk penilaian terbaik), dilaporkan bahwa rerata IPK negara-negara dengan budaya Long-Term Orientation adalah 35 – 44; sedangkan rerata IPK negara-negara dengan dengan budaya Short-Term Orientation adalah 71, 77, 32, 39. Secara singkat kondisi ini dapat dirangkum dalam tabel berikut:

Dimensi:	Short-Term	Long-Term
Long Term Orientation – Short Term Orientation	USA, Australia, Latin American, African and Muslim countries	East Asian countries, Eastern- and Central Europe
Indeks Persepsi Korupsi	71, 77, 32, 39	44, 35
Dimensi	Indulgence	Restraint
Indulgence-Restraint	South and North America; Western Europe, Sub-Saharan Africa	Eastern Europe, Asia and Muslim world.

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa antara negara dengan Budaya Long-Term Orientation dan negara dengan Budaya Short-Term Orientation, secara umum, memiliki perbedaan. Negara dengan budaya Long-Term cenderung memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi rendah; sedangkan negara dengan budaya Short-Term Orientation tidak memiliki kecendrungannya satu arah. Dengan demikian kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah negara dengan Budaya Long-Term cenderung akan lebih dipersepsi korup; tetapi negara dengan budaya Short-Term Orientation, mempunyai peluang lebih besar untuk tidak dipersepsi korup.

**f) Korupsi dan Dimensi Indulgence – Restraint**

Berdasarkan Dimensi Indulgence – Restraint, Hofstede membedakan masyarakat dengan budaya Indulgence dan masyarakat dengan budaya Restraint. Berdasarkan skor Indeks Indulgence – Restraint 76 negara yang diteliti, Hofstede, dkk. (2010) menemukan bahwa negara dengan budaya Indulgence adalah negara-negara Amerika Utara dan

Amerika Selatan, Eropa Barat dan Afrika Sub-Shara; sementara negara dengan budaya Restraint adalah negara Eropa Timur, Asia dan negara-negara Muslim. Di sisi lain, berdasarkan laporan Transparency International (2019) mengenai Indeks Persepsi Korupsi, dalam skala 100 (1 untuk penilaian terburuk, dan 100 untuk penilaian terbaik), dilaporkan bahwa rerata IPK negara-negara dengan budaya Indulgence adalah 44, 66, 32; sedangkan rerata IPK negara-negara dengan dengan budaya Restrained adalah 35, 39. Secara singkat hal ini disajikan pada tabel di bawah ini.

Dimensi	Indulgence	Restrained
Indulgence-Restraint	South and North America; Western Europe, Sub-Saharan Africa	Eastern Europe, Asia and Muslim world.
Indeks Persepsi Korupsi	44,66,32	35, 39

Dengan melihat data tersebut, secara sederhana dapat dipahami bahwa negara dengan budaya Restrained cenderung memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi rendah (kurang dari 50); sedangkan negara dengan budaya Indulgence berpotensi untuk mendapat skor Indeks Persepsi Korupsi tinggi. Dengan demikian hubungan antara budaya restrained dan korupsi cenderung negatif.

## Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, melalui analisis empiris sederhana terhadap data tentang indeks persepsi korupsi dan penelitian Hofstede terhadap 76 negara terkait dengan dimensi budaya yang dikemukakannya, dapat disimpulkan hal-hal berikut: (1) Dimensi Power Distance dan Dimensi Individualisme – Kolektivisme memiliki indikasi kuat memiliki hubungan dengan Indeks Persepsi Korupsi; (2) Dimensi Uncertainty Avoidance dan Dimensi Masculinity-Femininity cenderung tidak memiliki hubungan dengan Indeks Persepsi Korupsi; (3) Dimensi Indulgence-Restrained, memiliki indikasi berkorelasi negatif dengan indeks persepsi korupsi pada budaya restrained; sedangkan budaya indulgence, cenderung tidak berkorelasi; (4) Negara dengan Budaya Long-Term cenderung akan lebih dipersepsi korup; tetapi negara dengan budaya Short-Term Orientation, mempunyai peluang lebih besar untuk tidak dipersepsi korup.

## Referensi

- Barr, A., Serra, D. (2010). Corruption and Culture: An Experimental Analysis. *Journal of Public Economics*, 94, 862-869.
- Blackburn, K. & Forgues-Puccio, G. F., 2009. Why is corruption less harmful in some countries than in others?. *Journal of Economic Behavior & Organization*, Volume 72, pp. 797-810.
- CBanuri, S., Eckel, C. (2012). Experiments in Culture and Corruption: A Review. *Impact Evaluation Series*, No. 56. The World Bank Development Research Group.
- Dimant, E., 2013. The Nature of Corruption: An Interdisciplinary Perspective. *Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal*.
- Graff, G. de. (2007). Causes of Corruption: Towards A Contextual Theory of Corruption

- Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. *Online Readings in Psychology and Culture*, 2 (1). [Hattps://doi.org/10.9707/2307-0919.1014](https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014).
- Jiang, G. (2017). Corruption Control in Post Reform China: A Social Censure Perspective. Book Chapter: Corruption – Theories and Perspectives, p.11-29. Singapore: Springer.
- Judge, W. Q., McNatt, D. B. & Xu, W., 2011. The antecedents and effects of national corruption: A meta-analysis. *Journal of World Business*, 01, Volume 46, pp. 93-103
- Lambsdorff, J. G., 2006. Causes and consequences of corruption: What do we know from a crossection of countries?. In: S. Rose-Ackerman, ed. *International Handbook on the Economics of Corruption*. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., pp. 3-51.
- Stapenhurst, R., Johnston, N. & Pelizzo, R., 2006. *The role of parliament in curbing corruption*. Washington D.C.: World Bank Institute.
- Tranpcarancy International, 2019. Corruption Perception Index 2018.

